

“Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka”

Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Wilayah Perdesaan dalam Mengentaskan Kemiskinan

Yennita Sihombing

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Jl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor, 16114

Abstrak

Pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dalam menurunkan kemiskinan di perdesaan dilakukan dengan pengembangan industri yang seimbang, memperbaiki struktur pertanian, program peningkatan pendidikan masyarakat perdesaan, peningkatan program pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan cara program pelestarian lingkungan dan penguatan lembaga-lembaga di perdesaan maupun sarana dan prasarana. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpotensi cukup besar dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan sehingga dapat membantu perekonomian daerah serta dapat menciptakan lapangan kerja. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi wilayah perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode *Desk Research*, kemudian di analisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif untuk menjawab tujuan penulisan melalui telaah literatur dengan mendeskripsikan peran sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah perdesaan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Pertanian, berbagai hasil penelitian, jurnal, kebijakan pemerintah, dan lembaga terkait yang dapat mempertajam kedalaman analisis. Sektor pertanian berperan penting terhadap upaya pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Sektor pertanian menjadi kunci dan dapat sebagai *leading sector* dalam mengurangi kemiskinan secara agregat, mengingat kemiskinan terbesar terdapat di wilayah perdesaan. Pengembangan ekonomi perdesaan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di dapat dilakukan oleh pemerintah terkait maupun masyarakat perdesaan melalui program pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan.

Kata kunci: Kemiskinan, *Desk Reserach*, perekonomian perdesaan, sektor pertanian

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang

melimpah menjadi modal pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional (Hayati et al. 2017). Hal ini dapat diukur dari pembentukan produk domestik bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penciptaan ketahanan pangan nasional, dan penyedia bahan baku (Budiman, 2013).

Salah satu tujuan pembangunan perdesaaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada bulan September 2017 ada 16,31 juta masyarakat desa di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, 23% rumah tangga kategori pra-sejahtera bekerja di sektor pertanian (Wibowo dan Alfarisy. 2020).

Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, yang merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan. (1) memberdayakan ekonomi masyarakat desa; (2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan; (3) pembangunan prasarana di pedesaan; (4) membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun non formal (Ulumiyah 2013, Zulkarnaen 2016). Menyikapi hal tersebut, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil studi literatur dan menelaah peran sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode *Desk Research*, kemudian di analisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Untuk menjawab tujuan penulisan, pengkajian dilakukan melalui telaah literatur dengan mendeskripsikan peran sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah pedesaan. Pengkajian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Pertanian, berbagai hasil penelitian, jurnal, kebijakan pemerintah, dan lembaga terkait yang dapat mempertajam kedalaman analisis.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran sektor pertanian

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat potensial dalam pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan dan atau meningkatkan harga yang petani terima atas produk-produk yang dihasilkan oleh petani (Rompas et al. 2015).

Menurut Jhingan (2010) sumbangan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam hal: a. Menyediakan surplus pangan besar sehingga akan meningkatkan pendapatan; b. Meningkatkan permintaan akan produk industri dengan demikian akan mendorong peningkatan pendapatan di sektor industri; c. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus; d. Meningkatkan pendapatan desa; dan e. Memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan (Dama et al. 2016).

Pembangunan yang berlangsung selama ini belum berhasil mengangkat petani dan pertanian pada posisi yang seharusnya. Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh BPS, (2020) dimana rumah tangga miskin terbanyak yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian terdapat di desa, yaitu sebesar 63,73%, sementara yang berada di perkotaan sebesar 26,71%. Dampak nyata akibat terpuruknya pertanian diantaranya: 1) tingkat kemiskinan meningkat; 2) ketahanan pangan rendah; 3) tingginya ketergantungan pada pangan dari luar negeri; 4) industrialisasi yang terjadi sangat tergantung pada faktor produksi atau bahan baku; 5) pengangguran di pedesaan tinggi; 6) stabilitas keamanan rendah; 7) mutu kehidupan di pedesaan merosot; 8) kualitas sumberdaya manusia menurun; 9) kualitas lingkungan dan sumberdaya alam merosot; dan 10) daya saing bangsa rendah. Untuk mencegah hal-hal tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian dalam upaya pemberdayaan sektor pertanian dan penentuan prioritas pembangunan pertanian di pedesaan (Harianto, 2007).

Dari literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi di pedesaan melalui beberapa cara. Pertama, sektor pertanian yang tumbuh cepat akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di pedesaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non pertanian. Kedua, mendorong pembangunan agroindustri, mengakibatkan semakin tumbuhnya infrastruktur, pedesaan dan perkotaan, serta semakin meningkatnya kemampuan manajerial sumberdaya manusia. Ketiga, kemajuan teknologi di

sektor pertanian yang diwujudkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, menjadikan sektor ini dapat menjadi sumber tenaga kerja yang relatif murah bagi sektor non-pertanian. Keempat, pertumbuhan sektor pertanian yang diikuti oleh naiknya pendapatan penduduk pedesaan akan meningkatkan tabungan, yang merupakan sumber modal untuk membiayai pembangunan sektor non-pertanian.

B. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang utama bagi suatu bangsa, yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh setiap wilayah dimana pertumbuhan ekonomi dipandang menjadi masalah jangka panjang (Wahyuni et al. 2020).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional, mengarah ke Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain (Setyowati, 2012). Subandi (2011) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau terjadi tidaknya perubahan struktur ekonomi. Pendapatan nasional terdiri dari GDP dan GNP. GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun, termasuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait. GNP (*Gross National Product*) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun (Anonymous, 2021).

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu desa, memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya yang mata pencahariannya didominasi oleh petani. Petani dikatakan sejahtera apabila tersedia sumberdaya alam, sumberdaya manusia, lahan, dan ketersediaan modal dapat terpenuhi dalam melakukan usahatani. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dimana kesejahteraan penduduk yang tinggi akan menjadikan pertumbuhan ekonomi negara semakin baik.

C. Pembangunan ekonomi perdesaan

Pembangunan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk atau pendapatan daerah riil, diukur melalui output riil sebagai gambaran peningkatan taraf hidup (Prasetyo et al. 2019).

Perkembangan ekonomi yang berkembang semakin pesat, mengakibatkan terjadinya

urbanisasi secara cepat, sehingga masyarakat akan meninggalkan desa dan pertanian, akibatnya terjadi transfer tanah ke penggunaan lain, sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem di perdesaan, sehingga tercipta kemiskinan baru di perdesaan (Guo et al. 2019). Hal ini sejalan dengan Nasfi, (2020) bahwa perekonomian perdesaan mengakibatkan terjadi kemiskinan, tenaga kerja di perdesaan yang surplus dan kurang lahan yang akan digarap, sehingga akan terjadi urbanisasi ke kota dimana permintaan tenaga kerja tinggi dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari perdesaan.

Dari hasil yang dikaji oleh penulis, banyak pemuda desa yang tidak lagi tertarik untuk melakukan usahatani seperti yang dilakukan oleh orangtuanya. Para pemuda desa tersebut lebih tertarik untuk bekerja sebagai buruh pabrik di kota besar karena tergiur dengan upah yang cukup besar dan kontinue (tiap bulan gaji). Pemuda desa merasa apabila bekerja di sektor pertanian, maka upah yang diberikan (apabila bekerja sebagai buruh tani) dan hasil panen tidak sebanding dengan lelah dan modal yang telah dikeluarkan selama berusahatani. Tidak sedikit juga petani yang menjual lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak memiliki modal dalam berusahatani dan tidak ada yang mengelola lahan pertaniannya. Hal ini mengakibatkan yang dulunya lahan pertanian sekarang berubah menjadi bangunan atay pabrik, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan semakin sedikitnya lahan hijau.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan antara lain: 1) Keuangan yang stabil, jalan, informasi dan budaya sehingga pengembangan antara kota dan desa seimbang; 2) Memperbaiki struktur pertanian, cara pengolahan lahan, pemasaran produk pertanian; 3) Menciptakan dan meningkatkan agroindustri untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan; 4) Meningkatkan pendidikan masyarakat perdesaan (Harmawati dan Lubis, 2018).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan antara lain: (1) mempermudah akses petani dalam memperoleh pinjaman untuk modal seperti bank; (2) membentuk kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Petani dan Koperasi Unit Desa) dan kelembagaan non-ekonomi di desa (kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi, dewan komoditas), (3) memberikan bantuan saprodi seperti pupuk, benih/bibit, dan alat/mesin pertanian, (4) mengadakan bimbingan teknis dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani.

Untuk mewujudkan pembangunan perekonomian perdesaan diperlukan peran dan keikutsertaan masyarakat perdesaan, sehingga dengan demikian masyarakat perdesaan akan peduli terhadap ekonomi yang berkelanjutan, termasuk bagi masyarakat sendiri untuk menjaga

dan meningkatkan pendapatan rumahtangganya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum sangat dibutuhkan sebagai obyek sasaran utama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan (Sari et al. 2019).

D. Prospek pengembangan ekonomi desa

Pengembangan ekonomi perdesaan sudah semenjak lama dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program. Kegiatan ekonomi masyarakat desa dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional (Abidin 2015, Zainudin 2016), namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. (Attar et al. 2013, Sidik 2015, Zulkarnaen 2016).

Prospek pengembangan ekonomi desa antara lain (1) usaha pengembangan potensi daerah berupa desa wisata, melimpahnya kekayaan alam Indonesia dan uniknya budaya lokal, memberikan daya tarik sendiri bagi wisatawan domestik maupun turis mancanegara; (2) diversifikasi pangan lokal berbasis bahan lokal seperti singkong. Sektor non-pertanian di daerah perdesaan menjadi sumber pertumbuhan dan kesempatan kerja yang penting. Sektor non pertanian yang semula bersifat usaha sampingan dan berorientasi subsisten, semakin menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan yang penting bagi rumahtangga di perdesaan.

E. Peran sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan

Peran sektor pertanian semakin strategis karena sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara. Pada tahun 2019 tingkat produksi dan nilai tambah yang terjadi di sektor ini mencapai Rp1.355 triliun atau 12,4 persen dari PDB nasional (Dahiri dan Fitri, 2020).

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang dapat memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa atau kelurahan untuk percepatan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanjani et al. 2010). Sektor pertanian sebagai penyedia pangan memiliki keterkaitan yang erat dengan eksistensi kemiskinan. Sebesar 1,09 miliar penduduk dunia adalah miskin, sekitar 74 persen atau 810 juta jiwa hidup pada wilayah marginal dan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dengan skala kecil (Hermawan, 2014).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, dimana desa identik dengan pertanian maka pemerintah terkait perlu menerapkan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen, mengurangi kerusakan tanah, dan menerapkan inovasi teknologi

pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian hasil panen melimpah (Nasfi et al. 2019). Program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian seperti P4K, Delivery, P2LK, Pidra, PK2PM, *Poor Farmers* (PFI3P/P4UM), PKMP, LUEP dan Primatani dan program lainnya berorientasi penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian akan mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan karena langsung mengarah pada sektor sentral yang menjadi mata pencaharian penduduk miskin. Sektor pertanian memiliki fungsi ganda (multifungsi) yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (Purnami dan Saskara, 2016).

F. Strategi dan implikasi kebijakan

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

Strategi yang dapat ditempuh melalui sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah perdesaan dalam mengentaskan kemiskinan, mencakup: (1) Pembangunan perdesaan disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional dan pembangunan daerah; (2) Pemanfaatan potensi desa secara rasional dan optimal tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam; (3) Pengembangan landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri; (4) Pemanfaatan inovasi teknologi pertanian; (5) Memperbaiki infrastruktur; (5) Menumbuh kembangkan kelembagaan petani (poktan/gapoktan) (Hermawan, 2012).

Pembangunan ekonomi perdesaan melalui sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan partisipatif harus dilaksanakan secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah (Pusat) hingga pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota hingga desa). Keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam proses pembangunan mutlak diperlukan dalam upaya mempercepat pengembangan ekonomi perdesaan. Monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara benar dalam proses pembangunan secara partisipatif.

Program penanggulangan kemiskinan dalam implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga telah banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh LSM Bina Swadaya diantaranya:

(1) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam program-program penanggulangan kemiskinan; (2) Peningkatan peran corporate melalui program CSR; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal masyarakat; (4) Penyediaan fasilitas kredit mikro melalui lembaga keuangan (Hermantyo, 2008) . Dari keseluruhan program penanggulangan kemiskinan tersebut diharapkan pengentasan kemiskinan khususnya pada sektor pertanian dan kemiskinan di pedesaan secara bertahap dapat mencapai sasaran, sehingga jumlah masyarakat miskin di pedesaan yang sebagian besar dialami oleh para petani dapat berkurang.

Kesimpulan

Sektor pertanian berperan penting terhadap upaya pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Sektor pertanian menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan secara agregat, mengingat kemiskinan terbesar terdapat di wilayah pedesaan. Pengembangan ekonomi pedesaan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di dapat dilakukan oleh pemerintah terkait maupun masyarakat pedesaan melalui program pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dan meningkatkan program proyek percontohan di pedesaan.

Kebijakan pemerintah diharapkan mampu langsung menuju pada pusat di mana kemiskinan tersebut berada. Wilayah pedesaan yang sarat dengan kegiatan usahatani sebaiknya menjadi titik awal yang penting untuk melindungi dan memberdayakan petani, khususnya petani kecil. Melalui konsep agribisnis, petani sebagai subjek program kemiskinan yang utama harus pula diberdayakan dari sisi internal petani sehingga pada suatu saat dapat mengembangkan usaha dan kehidupannya.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Attar, M., Hakim, L. & Yanuwadi, B. (2013). Analisis Potensi dan Arah Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumiaji–Kota Batu. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 68-78.
- Anonimous. (2021). Pengertian dan Konsep Pendapatan Nasional. *Jurnal Entrepreneur*. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-konsep-pendapatan-nasional/>. Diunduh 24 April 2021.
- Budiman, M.A. (2013). Makalah Sektor Pertanian Dalam Konsep Pendapatan Nasional. 2013. UNPAD, Jatinangor.

- Dahiri & Fitri, H. (2020). Sektor Pertanian: Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal. *Buletin APBN*, 5(14), 7-11.
- Dama, H. Y., Lopian, A.L.Ch. & Sumual, J.I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Manado (tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549-561.
- Guo, S., Lin, L., & Su, S. (2019). Interactions Between Sustainable Livelihood of Rural Household and Agricultural Land Transfer in The Mountainous and Hilly Regions of Sichuan , China. *Sustainable Development*, 27(4), 725-742.
- Hariato. (2007). Peranan Pertanian dalam Ekonomi Pedesaan: Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat, Tanggal 4 Desember 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementerian Pertanian, Bogor.
- Harmawati, Y. & Lubis, B. P. M. (2018). Warga Negara dan Masalah Kontemporer dalam Paradigma Pembangunan. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 71-78.
- Hayati, M., Elfiana, & Martina. (2017). Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. *Jurnal S. Pertanian*, 1(3), 213-222.
- Hermantyo, A. I. (2008). Pengalaman Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sektor Pertanian (sebuah Refleksi).
- Hermawan, I. (2012). Analisis eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. *Mimbar*, 28(2), 135-144.
- Jhingan, M.L. (2010). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasfi, N., Sabri, S. & Moni, R. (2019). Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam. *JUSIE: Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi*, 4(02), 98-107.
- Nasfi. (2020). Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 54-66.
- Prasetyo, N. E., Setiawan, H. & Rakhmadian, M. (2019). Analisis Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan. *Ecoducation: Economic and Education Journal*. 1(2), 21-31.
- Setyowati, N. (2012). Analisis Peran Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Sepa*, 8(1), 147-149.
- Rafsanzani, H., Bambang S., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminitrasi Publik*, 1(4).
- Rompas, J., D. Enka, & K. Tolosang. (2015). Potensi sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 124-136.
- Sari, S. K., Afrizal, A., & Indraddin, I. (2019). Keberhasilan PKBI Sumatera Barat dalam Mewujudkan Perilaku Sehat Kolektif pada Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

- (STBM)(Suatu Studi Pemberdayaan Komunitas). *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 49–68.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 19(2), 115-131.
- Subandi. (2011). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota. Universitas Negeri Yogyakarta
- Ulumiyah, I. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 890-899.
- Wahyuni, E. I., M. Ramly & A. Arfah. (2020). Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata Dan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Selayar Periode 2008-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(4), 161-176.
- Wibowo, A.A. & M.F. Alfarisy. (2020). Analisis Potensi Ekonomi Desa dan Prospek Pengembangannya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 22(2), 204-218.
- Zainudin, A. (2016). Model kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2), 338-351.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 1-4.